

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut juga Polri mempunyai afiliasi dengan pemerintah, merupakan salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat. Polri sendiri tentunya mempunyai fungsi menciptakan keamanan dalam negeri, lebih tepatnya menjaga keamanan dan juga menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, mengeluarkan ketertiban dan menegakkan hukum secara adil, menciptakan aspek perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat Indonesia, sekaligus menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Eka, 2021).

Melihat tipe kantor polisi sektor atau biasa disebut kantor polsek saat ini, terdapat empat tipe kantor yang terbagi menjadi Polsek Metro, Polsek Urban, Polsek Rural, dan Polsek Prarural. Perbedaan tipe polsek terdapat pada pangkat pemimpinnya (Kapolsek), Polsek Metro di pimpin oleh AKBP, polsek tipe urban di pimpin kapolsek berpangkat Kepala Polisi (Kopol), sedangkan di Polsek Perdesaan, Kapolsek berpangkat Wakil Kepala Polisi (AKP), Kantor polisi tipe pra-lokal dapat dipimpin oleh seorang kepala polisi kedua (IPDA).

Fenomena yang ada saat ini adalah berkaitan dengan Citra kepolisian di Indonesia yang sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 berdasarkan survey litbang Kompas. Jejak pendapat ini menyatakan bahwa hingga 40% lebih koresponden menilai kinerja polisi buruk dan pada tahun 2023 citra kepolisian di mata Masyarakat sudah mulai naik walaupun masih di bawah puncaknya pada tahun 2021. (Hendarto, 2023).

Fenomena ini tidak sesuai dengan tugas kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anggota polisi harus memberikan rasa aman dan nyaman, serta melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya salah pihak kepolisian, melainkan situasi sulit yang ada di masyarakat, selalu berubah dan tidak lepas dari berbagai permasalahan kompleks.

Lembaga hukum seperti kepolisian sangat penting peranannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar pelayanan kepolisian dapat diberikan dengan sebaik-baiknya. Nama kepolisian pernah terjamah oleh beberapa oknum yang melanggar hukum, yang telah menurunkan reputasinya di mata publik.

Ada sejumlah masalah yang dapat mengurangi kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isu-isu ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kebijakan institusional, perilaku polisi, dan persepsi publik yang dipengaruhi oleh media dan pengalaman langsung masyarakat. Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang sering disebutkan yaitu korupsi, brutalitas polisi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), ketidakadilan dalam penegakan hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, integritas anggota, respon yang lambat atas pelaporan Masyarakat, kolusi dengan kriminal, penanganan demonstrasi, komunikasi dan hubungan Masyarakat, Penting bagi Polri untuk terus berusaha meningkatkan profesionalisme, transparansi, kinerja, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya untuk memperbaiki dan menjaga pamornya. Kepercayaan publik dapat dibangun kembali dan dipertahankan melalui pelatihan berkelanjutan, reformasi struktural, dan interaksi positif dengan masyarakat.

Perancangan ulang kantor polsek bertujuan merubah pandangan masyarakat terhadap kinerja polisi karena masih kurangnya tata letak (organisasi) pada bangunan kantor polisi yang tidak teratur sehingga membuat aktivitas para pengguna menjadi tidak maksimal. betapa pentingnya pengalaman mengunjungi Polsek ini agar masyarakat tidak merasa bingung saat berkunjung ke Polsek. Untuk memberikan pengalaman yang baik dengan layanan yang profesional, terbuka, ramah, dan sopan. Selain itu, menciptakan perasaan aman bagi seluruh Masyarakat, untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman bagi staf polisi, dan masyarakat yang datang ke kantor polisi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, melalui observasi pada Kantor Polsek Medan Labuhan, serta pengamatan pada fenomena, studi banding, dan studi preseden, didapatkanlah kesimpulan bahwa dalam ruangan maupun fasilitas yang digunakan oleh pihak staf kepolisian, narapidana dan Masyarakat yang datang ke kantor polisi belumlah sesuai dengan standar yang diterapkan, Sehingga diperlukan adanya perancangan ulang pada elemen-elemen sebagai berikut:

1. Organisasi ruang yang terdapat di polsek medan labuhan belum tertata dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan kenyamanan baik bagi staff maupun pengunjung.
2. Fasilitas nya belum memadai untuk menunjang aktivitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada perancangan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang organisasi ruang yang nyaman bagi staff dan pengunjung sehingga dapat menciptakan organisasi ruang yang baik dan mendukung aktivitas staff kepolisian dan masyarakat?
2. Bagaimana merancang kantor polsek ini agar memenuhi fasilitas ruang dan furniture pada perancangan ulang polsek medan labuhan ini?

1.4 Tujuan dan Sasaran Rancangan

1.4.1 Tujuan perancangan

Merancang ulang interior kantor Polsek Medan Labuhan dengan pendekatan Aktivitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan atau aktivitas yang akan di lakukan di polsek medan labuhan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas pada pengguna maupun pengunjung untuk meningkatkan efesiensi kerja, kenyamanan, dan keamanan bagi personel dan masyarakat.

1.4.2 sasaran perancangan

Ruangan staff kepolisian , area umum untuk masyarakat yang ingin membuat SKCK maupun melaporkan kasus, serta penjara yang layak huni untuk narapidana yang di tahan.

1.5 Objek Rancangan

Nama : Polsek Medan Labuhan

Tipologi : Polsek tipe rural

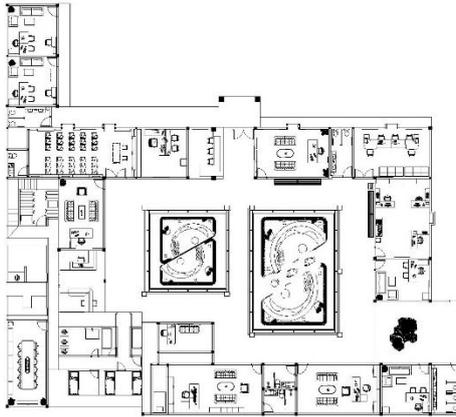
Alamat : Jl. Titi Pahlawan No.2, Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20253



Gambar 1. 1 Site Polsek Medan Labuhan

Sumber Google Earth

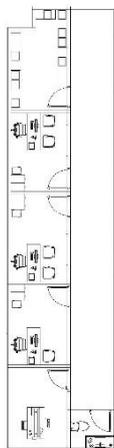
Denah lantai 1:



Gambar 1. 2 Denah Lantai 1 Polsek Medan Labuhan

Sumber : Data Pribadi

Denah lantai 2:



Gambar 1. 3 Denah Lantai 2 Polsek Medan Labuhan

Sumber : Data Pribadi

1.6 Batasan masalah :

Adapun batasan perancangan ini adalah sebagai berikut :

1. Perancangan Polsek Medan Labuhan memiliki luasan bangunan 1.016 m²
2. Lokasi perancangan berada di Jl. Titi Pahlawan No.2, Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.
3. Pengguna pada bangunan Polsek Medan Labuhan ini terdiri dari staff kepolisian, narapidana, dan Masyarakat umum.
4. Konsep desain ini menggabungkan standar fasilitas yang belum terpenuhi di Polsek Medan Labuhan, identitas Polri dan kebaruan dari desain perancangan.
5. Perancangan fasilitas area Polsek Medan Labuhan beserta ruang kerja.
6. Ruangan unit yang akan di rancang yaitu :
 - R.SPKT
 - R.Reskrim
 - R.Penjara
 - R.Provos
 - R.Restorative Justice
 - R.Samapta
 - R.Sium
 - R.SKCK
 - R.Binmas
 - R.Wakapolsek
 - R.Kapolsek
 - Aula
 - R.Penyimpanan
 - Lobby

1.7 Manfaat perancangan

Manfaat dari Redesain Polsek Medan Labuhan adalah :

- a. manfaat bagi penulis
 - Meningkatkan wawasan dan pengetahuan saya tentang perancangan Polsek Medan Labuhan dengan pendekatan Aktivitas.

- Meningkatkan pemikiran kritis, sikap bertanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah melalui proses yang di terapkan pada saat redesain Polsek Medan Labuhan.
- b. Manfaat bagi instansi Kepolisian
- Hal ini bisa menjadi acuan desain Polsek Medan Labuhan kedepan.
 - Agar perancangan Polsek Medan Labuhan kedepannya memerhatikan kebutuhan pengguna dan aktivitas didalam kantor Polsek Medan Labuhan.
- c. Manfaat bagi Masyarakat
- Ini akan menjadi referensi bagi sivitas akademika Universitas Telkom dan Masyarakat umum dalam membuat desain Polsek Medan Labuhan yang memerhatikan aktivitas pengguna.

1.8 Metode Perancangan

1.8.1 Penentuan objek

Dilakukannya penentuan objek yaitu agar mengetahui fenomena apa yang terjadi dengan cara pengumpulan data-data.

1.8.2 Mencari permasalahan

- a. studi literatur
- b. survey lokasi
- c. wawancara

1.9 Kerangka Berpikir

